

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang demokratis dalam sistem pemerintahannya, karena Negara memiliki fungsi dalam mengatur wilayah beserta masyarakatnya. Kehidupan bernegara saat ini, tentunya terdapat pemerintah yang mengatur masyarakat begitu pula ada masyarakat yang diatur oleh pemerintah. Meskipun pengaruh pemerintah lebih dominan dalam mengatur masyarakatnya dibandingkan masyarakat yang diatur oleh pemerintah karena pemerintah memiliki wewenang dalam menjalankan sistem pemerintahan guna bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat yang ada.

Tidak heran konflik muncul disebabkan oleh sistem pemerintahan yang ada. Roda pemerintahan dijalankan oleh penguasa, menghasilkan dukungan maupun penolakan dari masyarakat atas polemik kekuasaan yang muncul. Adanya penyimpangan yang terjadi pada pemimpin terkadang tidak bisa langsung dipahami dan dijangkau oleh fikiran masyarakat, baik buruknya perilaku masyarakat tergantung pada sistem pemerintahan yang ada, karena konflik dapat mempertegas adanya identitas dalam suatu kelompok yang bisa membentuk stratifikasi sosial.

Stratifikasi sosial adalah perbedaan antara individu, kelompok, golongan dalam masyarakat, dengan perbedaan kelas sosial yang secara hirarki membedakan

hak dan kewajiban individu maupun kelompok pada satu lapisan dengan lapisan lainnya.¹ Stratifikasi sosial dianggap penting dalam mengetahui latar belakang keluarga, watak, dan sifat dasar dari seseorang sebagai anggota masyarakat.²

Pada era kerajaan, *Arung* ialah pemilik utama sebagai kelas yang berkuasa dengan sistem kekuasaan yang berlandaskan pada ikatan darah. Namun, sejalan dengan perkembangan era tergantikan oleh demokrasi yang ukuran utamanya adalah kompetensi dan legitimasi. *Arung* dalam kamus bahasa bugis ke Indonesia dimaknai sebagai bangsawan. *Arung* yang terdapat di daerah Bone ialah keturunan dari raja kerajaan Bone yang sampai saat ini masih ada. Sebagai salah satu wilayah dengan sejarah tertegak dari pembagian kerajaan yang amat tangguh diantaranya Kerajaan Goa, Kerajaan Luwu dan Kerajaan Bone, masyarakat Sulawesi Selatan mayoritas tergolong aristokratis. Pembagian stratifikasi sosial antara bangsawan dan bukan bangsawan masih sangat kental.³ Sekaligus secara sosiologis, terdapat golongan elit kultur yang mayoritas dan memiliki kekuasaan dalam memperoleh akses politik lebih besar. Strata sosial tersebut berdampak pada konteks politik, terkhususnya ketika kalangan politik partisipatif berlangsung. Elit-elit kultur di Sulawesi Selatan sebagian besar meloncat menjadi elit politik sampai mendominasi pada basis ekonomi (atau sekaligus menjadi elit ekonomi).⁴

Pengangkatan raja pertama di Kabupaten Bone dilihat dari peristiwa chaos yang dianggap sebagai kearifan lokal sesuai era dengan keadaan kepercayaan

¹ Muin Indiando. 2004. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 48

² Ahmad Sultra Rustan. 2018. *Pola Komunikasi Orang Bugis*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hal. 149

³ Basir Muhammad, 2016. Skripsi: *Bangsawan Dalam Pilkada (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bone)*. Hal. 44

⁴ Ibid

masyarakat. Nilai budaya kerajaan menganggap To Manurung sebagai pemimpin yang berasal dari langit serta dianggap sebagai seseorang yang paling mulia. Kemudian kearifan ini dijadikan sebagai doktrin untuk memperkokoh kepercayaan masyarakat dengan melahirkan kontrak pemerintahan bahwa pemimpin diangkat berdasarkan kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan raja.⁵ Berdasarkan sejarah yang ada, kekuasaan raja serta budaya yang ada bergantung pada mitos raja. Dengan mitos To Manurung menjadi legitimasi atas kekuasaan raja yang ada, sehingga raja yang menjabat berikutnya berpatokan pada mitos tersebut walaupun demokrasi sudah ada semenjak zaman kerajaan, namun dengan adanya latar belakang yang memiliki hubungan darah dengan raja sebelumnya menjadi pengaruh kepada masyarakat untuk menentukan raja berikutnya sehingga mitos yang menceritakan asal usul dari To Manurung memainkan peran dalam mempengaruhi budaya politik yang ada.

Di era kerajaan pertama (To Manurung) memiliki sistem demokrasi yang ditandai dengan adanya pembentukan Ade Pitu sebagai wakil dan pembantu raja dalam menjalankan pemerintahannya, kalau saat ini Ade Pitu itu bisa disamakan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada saat itu yang menjadi sasaran utama dalam sistem pemerintahannya yakni memperbaiki konsolidasi dan stabilitas sosial dengan memfokuskan ekonomi rakyat yang ada. Di samping itu memperjelas kontrak sosial antara To Manurung sebagai raja Bone dengan masyarakat bahwa dalam pemerintahan harus ada musyawarah dengan ikhlas, menghargai manusia dengan hak-haknya, serta manusia diperlakukan secara adil tanpa semena-mena. Selain sifat demokrasi yang menafasi jaringan mulai

⁵ Abu Hamid Dkk. 2013. *Buku Sejarah Bone I*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone. Hlm. 12

pemerintahan, politik sampai dengan organisasi sosial, hal ini menjadi permainan yang dimainkan oleh pemimpin dengan rakyatnya.

Penggolongan masyarakat Bugis Bone dilihat dari pembagian lapisan yang memiliki pengaruh terhadap sosial politik dan ekonomi. Dengan adanya mitos raja To Manurung sebagai pemimpin dari langit membentuk pelapisan terhadap masyarakat Bugis. Berdasarkan hal tersebut masyarakat Bugis terbagi ke beberapa lapisan diantaranya atas dasar kemurnian darah bangsawan yang ada pada mereka. Dengan adanya pembagian kategori yang berdasar pada kemurnian darah bangsawan, kemerdekaan seseorang, serta kelebihan sebagai individu dengan masyarakat. Secara vertikal masyarakat Bone tradisional terbagi atas dua klasifikasi, yakni orang merdeka dan orang yang tidak merdeka. Kemudian orang yang merdeka ini terbagi lagi atas dua klasifikasi yaitu golongan bangsawan dan non bangsawan. Orang bangsawan dengan kemurnian darah dan keturunannya, makin tinggi pula tingkatannya.

Jika dilihat dari klasifikasi masyarakat Bone menurut tinggi rendahnya keturunan, Masyarakat Bone dapat dibedakan atas empat lapisan. Keempat lapisan tersebut ialah:

1. Arung

Mereka yang memakai gelar Arung yang dihubungkan dengan jabatannya dalam pemerintahan, dikarenakan derajat kebangsawannya, dan juga karena keturunan arung yang tidak mempunyai hubungan darah dengan raja Bone. Derajat kebangsawanan dapat dibagi atas tiga:

- a. Anak ‘arung Matasa, adalah golongan bangsawan yang memiliki tingkat bangsawan tertinggi yang masih dianggap berdarah putih.
 - b. Anak, ‘Arung Ribolang, yakni parah Bangsawan yang dianggap lebih rendah dari Anak ‘Arung Matasa yang artinya tidak memiliki darah campuran.
 - c. Anak ‘Arung Si PuE, bangsawan yang memiliki darah campuran, mereka masih keturunan Arung dari pihak ibu.
 - d. Anak ‘Cera bangsawan yang sudah bercampur dengan lapisan budak
2. To Deceng, berasal dari keturunan matowa, Anang, anreguru yaitu golongan yang menjaga kemurnian darahnya dan tidak berketurunan campuran.
 3. To Sama, golongan orang yang kebanyakan yang tidak diketahui asal usulnya.
 4. Ata (Sahaya), adalah orang yang hilang kemerdekaannya karena suatu ikatan langsung dikuasai oleh orang lain. Ata ini ini terbagi atas dua yakni:
 - a. Ata mana (Sahaya Warisan), mereka yang sudah turun temurun menjadi ata
 - b. Ata Riala Musu, yakni orang yang kalah dalam peperangan.
 - c. Ata Inreng, yakni seseorang yang mempunyai hutang dan tidak dapat melunasinya.⁶

Tabel 1. 1 Raja Bone dari masa ke masa

N O	NAMA RAJA BONE	TAHUN	JENIS KELAMIN
1	Manurunge Ri Matajang, Mata Silompoe	1330- 1365	Pria
2	La Ummasa, Petta Panre Bessie	1365- 1368	Pria
3	La Saliyu Korampelua	1368- 1470	Pria
4	We Banrigau, Mallajange	1470-	Wanita

⁶ Ibid. Hlm. 245

	Ri CINA	1510	
5	La Tenrisukki, Mappajunge	1510- 1535	Pria
6	La Uliyo Bote-e, Matinroe Ri Iterung	1535- 1560	Pria
7	La Tenrirawe Bongkange, Matinroe Ri Gucinna	1560- 1564	Pria
8	La Inca, Matinroe Ri Addenenna	1564- 1565	Pria
9	La Pattawe, Matinroe Ri Bettung	1565- 1602	Pria
10	We Tenrituppu, Matinroe Ri Sidenreng	1602- 1611	Wanita
11	La Tenriruwa, Sultan Adam, Matinroe Ri Bantaeng	1611- 1616	Pria
12	La Tenripale, Matinroe Ri Tallo	1616- 1631	Pria
13	La Maddaremmeng, Matinroe Ri Bukaka	1631- 1644	Pria
14	La Tenriaji, Arungpone, Matinroe Ri Pangkep	1644- 1672	Pria
15	La Tenritatta, Daeng Serang, Malampe-e Gemme'na, Arung Palakka	1672- 1696	Pria
16	La Patau Matanna Tikka, Matinroe Ri Nagauleng	1696- 1714	Pria
17	We Bataritoja, Datu Talaga Arung Timurung, Sultanah Zainab Zulkiyahtuddin	1714- 1715	Wanita
18	La Padassajati, Toappeware, Petta Rijalloe, Sultan Sulaeman	1715- 1718	Pria
19	La Pareppa, Tosappewali, Sultan Ismail, Matinroe Ri Sombaopu	1718- 1721	Pria
20	La Panaongi, Topawawoi, Arung Mampu, Karaeng Bisei	1721- 1724	Pria
21	We Bataritoja, Datu Talaga Arug Timurung, Sultanah Zainab	1724- 1749	Wanita

	Zulkiyahtuddin		
22	La Temmassonge, Toappawali, Sultan Abdul Razak, Matinroe Ri Mallimongeng	1749- 1775	Pria
23	La Tenritappu, Sultan Ahmad Saleh	1775- 1812	Pria
24	La Mappasessu, Toappatunru, Sultan Ismail Muhtajuddin, Matinroe Rilebbata	1812- 1823	Pria
25	We Imaniratu, Aung Data, Sultanah Rajituddin, Matinroe Ri Kessi	1823- 1835	Wanita
26	La Mappaseling, Sultan Adam Najamuddin, Matinroe Ri Salassana	1835- 1845	Pria
27	La Parenrengi, Arungpugi, Sultan Ahmad Muhiddin, Matinroe Riajang Bantaeng	1845- 1857	Pria
28	We Tenriawaru, Pancaitana Besse Kajuara, Sutanah Ummulhuda, Matinroe Ri Majennang	1857- 1860	Wanita
29	La Singkeru Rukka, Sultan Ahmad Idris, Matinroe Ri Topaccing	1860- 1871	Pria
30	We Fatimah Banri, Datu Citta, Matinroe Ri Bolampare'na	1871- 1895	Wanita
31	La Pawawoi, Karaeng Sigeri, Matinroe Ri Bandung	1895- 1905	Pria
32	La Mappanyukki, Sultan Ibrahim, Matinroe Ri Gowa	1931- 1946	Pria
33	La Pabbenteng, Matinroe Ri Matuju	1946- 1951	(Pria) ⁷

⁷ <http://www.sapripamulu.com/2018/01/sejarah-silsilah-raja-raj-bone.html?m=1>. Diakses pada 6 oktober 2022

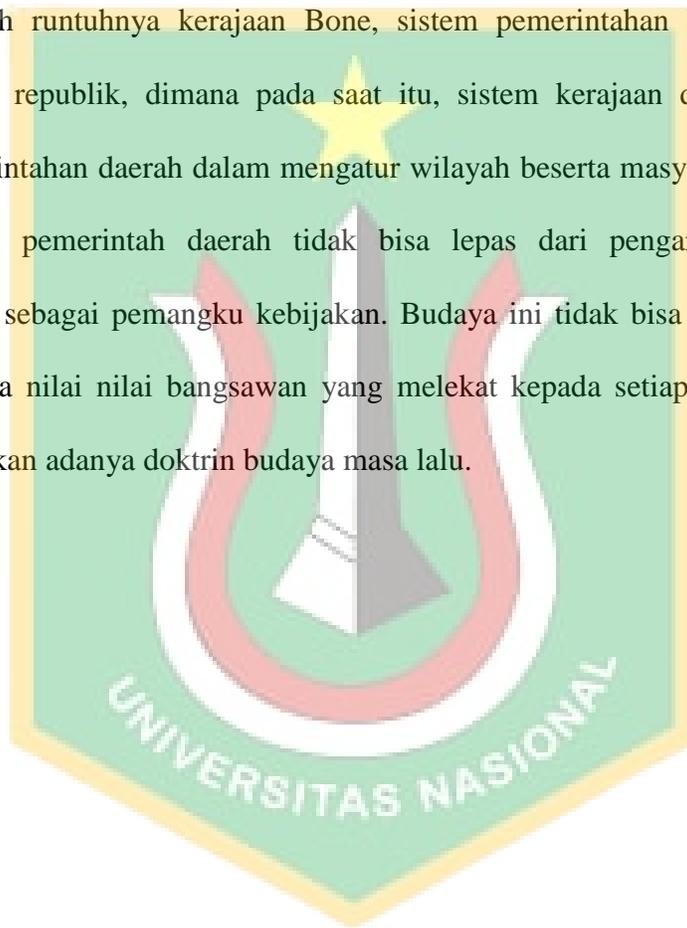
Dalam lingkup pemerintahan, Kabupaten Bone menganut sistem monarki pada era kerajaan dalam mengatur sistem pemerintahannya guna memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap raja yang pernah menjabat di Kabupaten Bone merupakan kaum *Arung* yang biasa dikenal sebagai bangsawan. Dalam kekuasaannya, kelompok *Arung* (bangsawan) menggariskan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi dan dihargai, misalnya dalam hal perkawinan. Agar identitas bangsawan di Kabupaten Bone tidak luntur, muncul aturan yang mengharuskan kelompok bangsawan hanya diperbolehkan menikah dengan kelompok bangsawan pula.

Kekuasaan merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi individu ataupun kelompok. Untuk mempertahankan kekuasaan *arung* (bangsawan) atas wilayah Kabupaten Bone, perkawinan politik terbentuk dengan melakukan perkawinan dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Kemudian menjadi budaya yang ada di Kabupaten Bone dizaman kerajaan. Hal ini dilakukan karena faktor yang dihasilkan dari perkawinan politik tersebut memberikan peluang besar bagi elite yang dimiliki oleh setiap warga Negara dengan kemampuan sebagai seorang manusia. Perdebatan ini menjadi permasalahan yang muncul secara negatif dikalangan masyarakat umum yang disebabkan oleh penguasa yang ada dan mengakibatkan adanya perampasan yang terjadi atas hak warga negara dalam memperoleh kehidupan dengan semestinya.

Dalam konteks keluarga, kalangan *arung* (bangsawan) di Kabupaten Bone memiliki kesadaran atas latar belakang mereka yang berasal dari masing masing keluarga yang punya nama. Kemudian memiliki keyakinan dalam menjunjung tinggi nilai dasar kepemimpinan atas sejarah *arung* (bangsawan) yang pernah ada.

Keyakinan yang selalu menjadi pemikiran dari setiap anggota keluarga yang memiliki garis *arung* (bangsawan) terus berkembang dalam mempertahankan eksistensinya sebagai keturunan dari pemimpin. Bukan sekedar keturunan pemimpin namun adanya keharusan dalam mempunyai kepribadian serta kemampuan dalam memimpin yang telah menjadi nilai dari setiap *arung* (bangsawan).

Setelah runtuhnya kerajaan Bone, sistem pemerintahan beralih ke sistem pemerintahan republik, dimana pada saat itu, sistem kerajaan digantikan dengan sistem pemerintahan daerah dalam mengatur wilayah beserta masyarakatnya. Setelah era kerajaan, pemerintah daerah tidak bisa lepas dari pengaruh kaum Arung (Bangsawan) sebagai pemangku kebijakan. Budaya ini tidak bisa luntur begitu saja karena adanya nilai nilai bangsawan yang melekat kepada setiap masyarakat bone yang disebabkan adanya doktrin budaya masa lalu.



Tabel 1. 2 Bupati Kabupaten Bone dari masa ke masa

No	Nama	Tahun
1	Abdul Rachman Daeng Mangung	1951
2	Andi Pangerang Daeng Rani	1951-1955
3	Ma'mun Daeng Mattiro	1955-1957
4	La Mappanyukki	1957-1960
5	Andi Suradi	1960-1966
6	Andi Djamuddin	1966-1966
7	Andi Tjatjo	1966-1967
8	Andi Baso Amir	1967-1969
9	H. Suaib	1969-1976
10	H.P.B. Harahap	1976-1982
11	H. Andi Madeali	1982-1983
12	Andi Syamsu Alam	1983-1988
13	Andi Syamsoel Alam	1988-1993
14	Andi Muhammad Amir	1993-1998
15	Andi Muhammad Amir	1998-2003
16	H. Andi Muh. Idris Galigo	2003-2008
17	H. Andi Muh. Idris Galigo	2008-2013
18	Dr. H. Andi Fahsar M. Padjalangi, M.Si	2013-2018
19	Ir. H. Andi Bakti Haruni, C.E.S.	13-2-18-26-9-18
20	Dr. H. A. Fahsar M. Padjalangi, M.Si.	2018-2023

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa, setelah dominasi bangsawan pada era kerajaan, kembali lagi dominasi bangsawan di era pemerintahan kepala daerah. Dari zaman orde baru sampai saat ini yang pernah menjadi Bupati Kabupaten Bone ialah kalangan *Arung*, hal itu bisa dilihat dari gelar “Andi” pada daftar nama kepala Bupati Bone dari masa ke masa.

Sistem pemerintahan tidak selalu bersifat tetap, terkadang bersifat dinamis pada setiap zamannya. Seiring dengan perkembangan waktu, perubahan sistem pemerintahan di Kabupaten Bone sudah menjadi hal yang biasa dimata masyarakat. Bone awalnya sebagai kerajaan dengan raja pertama yakni To Manurung yang dimaknai sebagai yang turun dari langit dengan gelar Arung Bone "Raja Pusat Bone yang telah dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Bone sampai saat ini. Pengangkatan

raja Bone didasari musyawarah serta mufakat dengan sistem demokrasi yang ada terkhusus nya kompromi yang dilakukan oleh Dewan Adat.

Peninggalan kerajaan-kerajaan terdahulu yang masih berpengaruh di Sulawesi Selatan adalah pengaruh kalangan *Arung* di ranah sosial dan politik. *Arung* bugis dengan gelar “Andi” berdasarkan sejarah, memegang posisi tinggi di masyarakat. Bangsawan biasanya memiliki tanah yang luas dan menjabat sebagai pejabat dan politisi. Secara struktural, mereka tergabung dalam kelompok elit bersama para profesional, pengusaha, intelektual, dan tokoh agama. Di lingkungan saat ini, para bangsawan ini masih berperan sebagai idola dan menjaga hubungan dengan para pengikutnya.⁸

Dalam ranah lokal, kerap kali bermunculan fenomena dinasti politik pada suatu pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan adanya reorganisasi dalam pemerintahan yang ada. Sehingga begitu banyak elit lokal yang bermunculan untuk sebuah struktur pemerintahan yang menjadi wujud demokrasi di daerah dengan menawarkan proses penerimaan atas unsur-unsur baru terutama dalam hal pergantian kepemimpinan. Reorganisasi ini diartikan sebagai kembalinya pengaruh kekuasaan politik elit lokal ke dalam era demokrasi yang sudah menjadi budaya di daerah tertentu.

Tentu hal di atas terdengar dinasti politik terjadi pada sistem pemerintahan yang ada, sebagai cerminan bahwa sistem politik masa lampau merupakan bentuk kekuasaan yang kental dari budaya-budaya masyarakat kerajaan. Kemudian setiap raja yang pernah memiliki kekuasaan di kabupaten Bone diyakini memiliki hubungan

⁸ Ibid. Hal. 45

darah dengan raja sebelumnya sampai dengan raja yang pertama kali menduduki tahta kerajaan Bone. Sehingga sampai saat ini, hubungan darah dengan bangsawan ataupun raja pertama menjadi wacana dalam setiap konstestasi politik yang ada di Kabupaten Bone. Padahal sirkulasi elite sangat baik dalam ranah pemerintahan yang sehat.

Sirkulasi elite merupakan perputaran ataupun pergantian kepemimpinan dari pemimpin elite yang lama digantikan oleh pemimpin elite yang baru dalam ranah kekuasaan. Hal ini sangat penting dikarenakan membawa angin demokrasi yang sehat dalam suatu sistem pemerintahan. Kemudian dengan adanya sirkulasi yang sehat membuat iklim politik tidak didominasi oleh kaum-kaum tertentu saja. Di dalam politik, sirkulasi merupakan bagian dari kontrol jalannya suatu kekuasaan.

Namun, pelbagai fenomena menjadi penghambat dari sirkulasi elite politik yang terjadi di lapisan masyarakat saat ini. Di ranah pemerintah kabupaten Bone terkhususnya dalam kontestasi politik (Pilbup) terdapat dominasi dari kaum bangsawan dalam hal kepemimpinan. Latar belakang sebagai bangsawan menjadi salah satu poin penting dalam memasarkan diri sebagai pemimpin yang layak. Fenomena seperti ini tentu dapat memberikan pengaruh terhadap sirkulasi yang ada. Dengan adanya pola kekerabatan dan didukung dengan budaya dinasti mengakibatkan situasi politik yang negatif.

Di lain hal, akan menjadi rintangan yang sulit bagi setiap pendatang baru (non-bangsawan) dalam menjangkau kekuasaan politik yang dibenturkan dengan budaya (harus bangsawan) yang berhubungan dengan tali darah yang sama dalam konsep kekerabatan. Sedangkan dengan perkembangan demokrasi yang kian semakin pesat namun tetap akan terbungkam dengan praktek dinasti yang sudah terbentuk.

Berdasarkan hal tersebut memberikan ketertarikan terhadap penulis dalam meneliti fenomena ini. Zaman kerajaan Bone sudah lama selesai bukan lagi monarki dan telah tergabung dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem presidensial dengan demokrasi nya.

Di sisi lain, akses terhadap sistem pendidikan saat ini hampir bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Artinya Arung (Bangsawan) ataupun Non-Arung (Non-bangsawan) memiliki hak maupun pendidikan yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Bahkan juga mampu memiliki keahlian, kecerdasan dibidang masing-masing terutama dalam memegang jabatan pemerintahan. Artinya, masyarakat yang ada di Indonesia memiliki hak-hak yang sama terutama dalam memimpin daerah. Kemudian dalam penelitian ini penulis akan membatasi pembahasan dengan fokus penelitian pada Dominasi Politik Arung (Bangsawan), Dalam Sirkulasi Elite di Pemerintahan Kabupaten Bone

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah:

1. Faktor apa yang mendukung dominasi dinasti Arung (Bangsawan) dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Bone?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang ada, penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Faktor yang mendukung dominasi dinasti Arung (Bangsawan) dalam jabatan Bupati di Kabupaten Bone

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran ilmiah serta pemahaman yang baru terkait dengan penelitian ini terkait dengan sirkulasi politik yang terjadi pada struktur pemerintahan Kabupaten Bone yang hanya bertahan dikalangan *arung* (bangsawan) saja.
2. Kemudian secara akademis, Penulis mengharapkan dalam penelitian ini menjadi referensi dalam mata kuliah khususnya ilmu politik yang berkaitan dengan politik dinasti yang terjadi pada pemerintahan di Kabupaten Bone
3. Secara praktis, penulis mengharapkan dalam penelitian ini menjadi acuan maupun pedoman yang dapat membantu praktisi dalam menganalisis terjadinya politik dinasti dalam sebuah dominasi politik *arung* (bangsawan) pada sirkulasi elite struktur pemerintahan terkhususnya pada Kabupaten Bone.
4. Secara metodologis, penulis berharap untuk kedepannya ada kajian berikutnya yang membahas tentang politik dinasti terkait dominasi politik *arung* (bangsawan) dalam sirkulasi elite pemerintahan Kabupaten Bone.

1.4. Sitematika Tulisan

Guna memudahkan dalam memahami pemaparan penulis dalam penelitian ini, karena itu pula terdapat sistematika penulisan penelitian yang disajikan sebagai kerangka yang menjadi patokan tulisan dalam skripsi ini demi memperjelas substansi yang ada pada setiap bab pembahasannya. Maka dari itu Adapun penyajian sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis sebagai berikut.

1. Bagian Awal Skripsi

Di bagian permulaan skripsi ini terdapat beberapa hal yang dilampirkan oleh penulis. Antara lain, terdapat halaman judul penelitian, kemudian lembar persetujuan dari dosen pembimbing, lembar pengesahan, abstrak, lembar kata pengantar, lembar daftar isi, kemudian ada pula daftar lampiran.

2. Bagian inti Skripsi

Terdapat beberapa bab beserta sub bab yang ada dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu tentang pendahuluan dalam tulisan ini berisi, latar belakang masalah penelitian yang dijelaskan oleh penulis tentang bagaimana sejarah yang terjadi dalam struktur pemerintahan di Kabupaten mulai dari era kerajaan sampai dengan pemerintahan saat ini terkhususnya diranah struktur pemerintahan ditingkat Kabupaten. Kemudian juga

menjelaskan rumusan masalah penelitian, sampai dengan tujuan dan manfaat penelitian, beserta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua terdapat tinjauan pustaka pada penelitian ini yang membahas tentang kajian terdahulu sebagai bahan perbandingan dari tulisan ini yang nantinya menjadi batasan masalah. Kemudian ada pula kerangka teori yang digunakan sebagai acuan bagi penulis dalam memahami serta mengkaji permasalahan dalam tulisan ini. Kerangka berpikir yang menjelaskan alur pemikiran secara garis besar dengan adanya penegasan dengan penggunaan teori yang dijadikan sebagai dasar dari kegiatan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga metode penelitian, berisikan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data yang digunakan oleh penulis dalam menyajikan hasil penelitian oleh penulis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ke-IV ini, penulis akan menyajikan gambaran umum mengenai profil kabupaten bone secara situasi histori sampai dengan adanya sirkulasi elit politik yang muncul serta bertahan dikalangan Arung (Bangsawan) saja.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis melampirkan hasil penelitian atas temuan penulis berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis di dalam penulisan proposal penelitian ini sehingga menjadi data penunjang dalam penelitian ini sendiri.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini akan menjadi penutup ataupun pembahasan akhir yang nantinya menyajikan kesimpulan berikut saran dalam penulisan penelitian ini.

Di akhir tulisan skripsi ini, terdapat daftar pustaka dan juga daftar lampiran

